

**BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Manajemen**



Oleh:

WERRY PUSPITASARI
NIM.10192509/M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2014**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kebaruan (<i>Novelty</i>)	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
A. Tinjauan Pustaka	11
B. Landasan Teori	13
1. Anggaran	13
2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)	15
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	16
C. Kerangka Pemikiran	25
D. Hipotesis.....	27
BAB III: METODE PENELITIAN	27
A. Format Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Jenis Dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Populasi, Sampel Dan Variabel Penelitian	31
F. Teknik Analisis Data	32

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Kondisi Geografis Kuantan Singingi	38
B. Kondisi Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi	39
BAB V: HASIL PENGOLAHAN DATA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN	53
A. Uji Asumsi Klasik	54
B. Hasil Pengujian Hipotesis	58
BAB VI: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN	65
A. Penerbitan Peta Bidang	66
B. Peralihan Hak	67
C. Penerbitan Sertipikat	68
D. Pengecekan Sertipikat	69
BAB VII: PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRACT

State Budget is the artery of a state in carrying out its administration. State budget is compiled in State Budget Revenue and Expenditure (SBRE) every year. The constitution which regulates the state budget is SBRE Law legalized by the House of Representatives each year. State budget was carried out by all departments and ministries/agencies. The Land Office is the task implemented of the State Land Agency of RI in district/city level. The Land Office carries out the budget management sourced from RM and PNPB fund. The absorption of PNPB fund depends on the amount of PNPB service at the Land Office. The absorption of PNPB fund is influenced by many factors. As for the aims of this research were to discover: 1). The significant effect of the amount of land map publishing, the amount of rights granting decree publishing, the amount of rights transition, the amount of certificate publishing, the amount of certificate checking, and the amount of mortgage mounting against the fund absorption in Land Office of Kuantan Singingi District. 2). The factor which influencing the fund absorption in Land Office of Kuantan Singingi district.

Research method used in this research was correlational method (relationship between variables) with quantitative approach. The difference with prior research was on the variable determination. The research variable consisted of: the amount of land map publishing, the amount of rights transition, the amount of certificate publishing and the amount of certificate checking. Variables used in this research were related with the service performed in land office. The analysis on the effects of variables performed with the t test with the significance degree by 5%.

Based on the research result and analysis, it was discovered that the amount of certificate checking and the amount of rights transition were variables that significantly influencing. The value of $t_{\text{calculation}}$ of t test on amount of certificate checking variables was amounted to 12.994 with the significance was by 0,000.

Key Words: Fund Absorption, the Amount of Certificate Checking.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran negara merupakan urat nadi bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan. Anggaran tersebut dapat diartikan sebagai dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintah) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai. Anggaran negara disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Pada dasarnya APBN sebagai bentuk kepercayaan rakyat kepada pemerintah untuk mengelola keuangan negara, pengelolaannya diharapkan dapat memenuhi syarat akuntabilitas (*accountability*), transparan (*transparency*), dan kewajaran (*fairness*). Anggaran belanja negara ditetapkan dalam konstitusi. Konstitusi yang mengatur pelaksanaan anggaran negara yaitu Undang-Undang APBN yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setiap tahunnya. Anggaran negara dilaksanakan oleh semua departemen dan kementerian/lembaga.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai kewenangan dibidang pertanahan, selain melaksanakan tugas pemerintahan juga melakukan pengelolaan anggaran negara yang bersumber dari APBN. Realisasi anggaran negara merupakan hal yang harus diperhatikan secara nasional. Realisasi

penyerapan anggaran per 15 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.824.919.435.196,00- (satu trilyun delapan ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) atau 41,57% dari pagu anggaran sebesar Rp.4.390.165.868.000,00,- (empat trilyun tiga ratus sembilan puluh milyar seratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Realisasi anggaran yang belum mencapai 50% pada trimester ketiga merupakan bukti kinerja pegawai BPN RI yang belum maksimal dalam menggunakan anggaran sesuai dengan perencanaannya.

Kantor pertanahan merupakan pelaksana tugas BPN RI pada tingkat kabupaten/kota. Kantor pertanahan melaksanakan APBN berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam satu tahun anggaran dari Januari s.d. Desember. Sumber dana APBN dalam DIPA terdiri atas 3 (tiga) sumber yaitu Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Dana RM adalah dana yang bersumber langsung dari APBN, sedangkan dana PNBP adalah alokasi pelaksanaan anggaran yang bersumber dana tertentu dan memiliki cara penarikan dana yang sesuai dengan sumber dana tersebut.

“PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah maupun keputusan menteri yang berlaku pada departemen atau lembaga non departemen masing-masing”. (Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Heseng, 2008 : 15)

Pelaksanaan anggaran di kantor pertanahan meliputi pelaksanaan anggaran yang alokasi dananya diperoleh dari Dana RM dan Dana PNBPN. Realisasi anggaran PNBPN dipengaruhi oleh besarnya penerimaan PNBPN pada kantor pertanahan. Penerimaan PNBPN sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Realisasi anggaran yang bersumber dari PNBPN dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan dana PNBPN erat kaitannya dengan kegiatan pelayanan PNBPN yang dilakukan kantor pertanahan. Keterlambatan penggunaan dana tersebut mengakibatkan penyerapan anggaran yang rendah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan satuan kerja yang membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan melakukan validasi data PNBPN di KPPN Rengat. Pengelolaan anggaran PNBPN dilakukan setelah adanya validasi data Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) pada KKPN. Jumlah setoran SSBPN menunjukkan jumlah dana PNBPN yang diterima oleh kantor pertanahan.

Realisasi penyerapan anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2009-2013 mengalami perbedaan. Perbedaan penyerapan anggaran PNBPN dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk kegiatan pelayanan pertanahan yang bersumber dari dana PNBPN tergantung dari jumlah SSBPN

PNBP. Adapun realisasi penyerapan anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Persentase Realisasi Anggaran PNBP Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.

Tahun Anggaran	Pagu Dana PNBP (Rp)	Realisasi Penyerapan PNBP (Rp)	Persentase Realisasi Penyerapan PNBP (%)
2009	948.122.500	714.160.294	75.32
2010	1.228.500.000	882.973.270	71.85
2011	849.634.000	562.973.270	66.17
2012	1.149.747.332	1.066.635.379	92.77
2013	1.190.134.000	1.182.201.440	99.33

(Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013)

Perbedaan penyerapan anggaran PNBP yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 penyerapan anggaran dana PNBP terserap hampir 100%. Penyerapan anggaran di kantor pertanahan dipengaruhi oleh faktor. Jumlah penyerapan anggaran PNBP dipengaruhi oleh jumlah kegiatan pelayanan PNBP. Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa penyerapan dana PNBP setiap tahun nya berbeda-beda. Kegiatan pelayanan melalui PNBP di BPN RI sesuai yang diatur pada Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Pelayanan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi meliputi pelayanan survei, pengukuran, dan pemetaan, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan pertimbangan teknis

pertanahan, pelayanan pendaftaran tanah, dan pelayanan informasi pertanahan.

Penyerapan anggaran yang terlambat perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Hendris Heranto (2012:3) menyatakan bahwa “banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran antara lain dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengadaan barang dan jasa hingga faktor-faktor internal dari penggunaan anggaran”. Realisasi penyerapan anggaran sering tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan. Menurut Adrianus Dwi Siswanto dan Sri Lestari Rahayu (2010), dalam artikelnya yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementrian/Lembaga Tahun Anggaran 2010”, menyimpulkan bahwa :

“Permasalahan Penyerapan Anggaran Belanja K/L 2010 berdasarkan data yang diperoleh dari hasil diskusi (*focus group discussion*) dan survei lapangan maka diperoleh informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu permasalahan yang bersumber dari:

- (1) Internal K/L,
- (2) Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,
- (3) Dokumen pelaksanaan anggaran dan proses revisi, dan
- (4) Permasalahan lainnya, seperti adanya peningkatan alokasi belanja K/L pada saat terjadi perubahan APBN sebagaimana tertuang dalam APBN-P”.

Terhambatnya penyerapan anggaran berhubungan dengan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pertanahan, karena realisasi anggaran merupakan salah satu indikator keberhasilan program pertanahan yang dilakukan oleh kantor pertanahan. Banyaknya jenis pelayanan kegiatan PNBPN pada Badan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan,

merupakan faktor yang dapat dijadikan sebagai indikator penyerapan anggaran PNBPN. Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran PNBPN menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengamati secara langsung pelaksanaan anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih judul: **”Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Apakah faktor jumlah penerbitan peta bidang, jumlah peralihan hak, jumlah penerbitan sertipikat dan jumlah pengecekan sertipikat berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran PNBPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor apakah yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran PNBPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini mempunyai dasar pemikiran untuk menguji hipotesis dari berbagai variabel yang diduga mempengaruhi penyerapan anggaran PNBP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi. Variabel-variabel tersebut adalah jumlah penerbitan peta bidang, jumlah peralihan hak, jumlah penerbitan sertipikat dan jumlah pengecekan sertipikat.
2. Data yang diteliti adalah data yang dikumpulkan dari Laporan Bulanan Penyelesaian Kegiatan Pertanahan dan Laporan Realisasi Anggaran belanja PNBP. Penulisan ini dilakukan hanya pada pelaksanaan penyerapan anggaran PNBP selama 60 bulan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

- a. Besarnya pengaruh dari jumlah penerbitan peta bidang, jumlah peralihan hak, jumlah penerbitan sertipikat dan jumlah pengecekan sertipikat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan tentang pelaksanaan pengelolaan anggaran dan beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan tentang pengelolaan anggaran untuk mewujudkan tertib anggaran dalam pelaksanaan saptatertib pertanahan.

E. Kebaruan (*Novelty*)

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis mengenai karya ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Untuk mengetahui perbedaan tersebut dapat dilihat dari Tabel 2 perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

No	Judul Nama dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
1	2	3	4	5
1.	“Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta”. Hendris Herriyanto, 2012 Tesis Universitas Indonesia	Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga yang ada di wilayah Jakarta	Kualitatif Eksploratori	Alternatif solusi kebijakan: 1. Faktor Perencanaan. 2. Faktor Adminstrasi 3. Faktor Sumber Daya Manusia 4. Faktor Dokumen Pengadaan 5. Faktor Ganti Uang Persediaan
2.	“Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar”. Prasetyo Adi Priatno Skripsi 2013 Universitas Brawijaya	Untuk menguji adanya pengaruh variabel yang di hipotesiskan dan seberapa besar presentase pengaruh bebas terhadap variabel terikat	Eksploratif Kuantitatif	Dari 15 indikator yang dimunculkan yaitu dapat di analisis faktor menjadi 3 variabel utama yaitu Faktor Adminsitasi dan SDM, Faktor Perencanaan, dan Faktor Pengadaan Barang dan Jasa.
3.	“Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru”. Tesis 2012	1. Mengevaluasi Tingkat Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru pada tahun 2010 2. Menganalisis Permasalahan dalam Tahapan Realisasi yang	Deskriptif Kuantitatif	Ada dua faktor utama yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja yaitu kebijakan teknis dan kultur pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Bersambung.....

Tabel 2. (Sambungan)

<p>Miliasih Universitas Indonesia</p>	<p>menjadi penyebab Keterlambatan Penyerapan Belanja Satuan Kerja di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru pada tahun 2010</p>		
<p>4. “Analisis Atas Faktor-faktor yang menyebabkan terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran”. Tesis 2011 Iwan Dwi Kuswoyo Universitas Gajah Mada</p>	<p>Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terkonsentrasinya penyerapan anggaran pada akhir tahun.</p>	<p>Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor perencanaan anggaran, faktor pengadaan barang/jasa, faktor internal satuan kerja.</p>
<p>5. “Beberapa Faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi”. Skripsi 2014 Werry Puspitasari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional</p>	<p>1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.</p>	<p>Korelasional Kuantitatif</p>	<p>Faktor yang signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran PNBPN yaitu jumlah pengecekan sertipikat dan jumlah peralihan hak.</p>

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara simultan atau bersama-sama keseluruhan variabel bebas berpengaruh terhadap penyerapan anggaran PNBPN. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan menggunakan regresi linear berganda. Dengan nilai Fhitung sebesar 64,767 dan F tabel sebesar 2,39. Variabel-variabel bebas itu adalah: jumlah penerbitan peta bidang, jumlah peralihan hak, jumlah penerbitan sertipikat, dan jumlah pengecekan sertipikat.
2. Jumlah pengecekan sertipikat dan jumlah peralihan hak merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran PNBPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan menggunakan regresi linear berganda diperoleh hasil perhitungan variabel jumlah pengecekan sertipikat dengan nilai t sebesar 12,994 dan signifikansi 0,000.

B. Rekomendasi

1. Peningkatan kinerja pegawai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga antusias masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya meningkat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah permohonan

pelayanan pertanahan yang bersumber dari dana PNBP, sehingga penerimaan menjadi meningkat.

2. Berdasarkan hasil analisis regresi didapatkan bahwa variabel jumlah pengecekan sertipikat berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran PNBP. Variabel yang signifikan dalam penyerapan anggaran untuk dapat dipertahankan. Sedangkan variabel lain yaitu penerbitan peta bidang, peralihan hak dan penerbitan sertipikat harus menjadi perhatian pihak kantor pertanahan untuk ditingkatkan kegiatan pelayanannya sehingga implikasinya dapat meningkatkan penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani, Y., 2012. *Perekonomian Indonesia: Catatan dari Luar Pagar*, Bayumedia, Malang.
- Algifari, 1997. *Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi Edisi I*. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- , 2000. *Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi Edisi II*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ardiyanto, D., 2012. “Evaluasi Realisasi Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2012 KPPN Malang”. *Laporan Kuliah Kerja Nyata Profesi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Bohari, 1995. *Hukum Anggaran Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Budi, S., 2010. “Identifikasi Penyebab dan Solusi Untuk Mengatasi Keterlambatan Penyerapan APBN”, *Focus Group Discussion*, Jakarta. (online) <http://www.fiskal.depkeu.go.id/> di upload 20 Juli 2010.
- Djafar S dan Heseng R., 2008. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dwi S, Andrianus dan Rahayu S., 2010. “Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2010”. *Jurnal*. (online) www.fiskal.depkeu.go.id diakses tanggal 17 Desember 2013.
- Halim, A., 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat.
- Hasan, M., 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor. Ghalia Indonesia.
- Hatomi, 2003. “Pengelolaan Keuangan, Anggaran dan Perbendaharaan Negara/Daerah Menurut UU Nomor 17/2003 Tentang Keuangan Negara”. *Anggaran Majalah Keuangan Sektor Publik*. Edisi 84 Tahun 2003: 51-54.
- Herryanto, H., 2012. “Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja

- Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta”. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Itianto, A., 2004. *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Jonathan, S., 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Yogyakarta* : Graha Ilmu.
- Krisyantono, 2006, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Kuswoyo, I. D., 2011. “Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran”. *Tesis*: Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Salemba Empat: Jakarta.
- Munandar, M., 2001. *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Edisi Pertama. BPFE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Rudianto, 2006. *Akuntansi Manajemen, Informasi untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*. Jakarta: Gramedia.
- Singarimbun, M & Effendi, S., 1995. *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Siswanto, D. A, dan Rahayu, S., 2010. “Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010”. Policy Paper Pusat Kebijakan APBN. (Online). <http://www.fiskal.depkeu.go.id> diakses tanggal 17 Desember 2013.
- Sugiyono, 2006. *Statistik Untuk Penelitaian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____, 2010. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- _____, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

- Suhipna, D dan Winarti, 2013. “ Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Penyerapan Anggaran di Wilayah Kerja KPPN Sragen”. *Jurnal Universitas Sriwijaya Volume XXV No.2* (online). www.ejournal.unisri.ac.id/index.php diakses tanggal 18 Desember 2013 diakses 18 Desember 2013.
- Sukandarrumidi, 2002. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sukardi, 2008. *Metodelogi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wijaya, 2000. “Analisis Statistik dengan Program SPSS 10.0”. Bandung: Alfabeta, yang di *upload* pada Senin, 20 September 2010 pada (online) <http://www.fiskal.depkeu.go.id> diakses tanggal 18 Desember 2013.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013*, UU Nomor 19 tahun 2013.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*, UU Nomor 17 Tahun 2003.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*, UU Nomor 20 Tahun 1997.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*, PP Nomor 24 tahun 1997.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional*, PP Nomor 46 Tahun 2002.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional*, PP Nomor 13 tahun 2010.